

EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh:

Yesi Merinda, Riswanti Rini, Sowiyah

FKIP Unila: Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng

E-Mail: perempuantangguh411@gmail.com

HP.: 085788758020

The purpose of this study is to provide a descriptive evaluation of the implementation of education aid policy in West Lampung. The method used is descriptive approach to evaluation by interview, observation and documentation. Informants consisted of BAPPEDA, Dept. of Education, principals, treasurer BPP, teachers, students and community leaders. The results of this study indicate that Evaluation of the context of this policy have a clear basis since the beginning is based on the fact of the education, Evaluation of input local authorities have had the readiness of the budget and long-term analyzes are both related to the implementation of this policy, participation in this policy; Evaluation process of channeling funds have been well understood by all parties and did not leave ambiguity of meaning the distribution, implementation of school can be run according to the rules set forth, and in case there are problems yet significant constraints and; Evaluation monitoring products performed well, teachers and students feel motivated, and provide long-term effect on increasing the APK.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan evaluasi deskriptif mengenai kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan evaluasi deskriptif model cipp dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, informan terdiri dari BAPPEDA, Kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, bendahara BPP, guru, siswa, dan elemen masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi konteks kebijakan ini memiliki dasar yang jelas sejak awal penyusunannya, Evaluasi input hasil menunjukkan bahwa pihak pemerintah daerah telah memiliki kesiapan anggaran dan analisis jangka panjang yang baik terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini, kesiapan SDM sekolah sebagai objek pelaksana kebijakan ini juga telah siap dan tidak terdapat penolakan dari para personil sekolah baik pendidikan

Kata kunci : evaluasi, kebijakan dana BPP, model CIPP

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang esensial untuk pembangunan berkelanjutan dan merupakan hak asasi yang fundamental. Pendidikan juga memiliki relevansi langsung terhadap kesejahteraan dan kebebasan manusia serta berperan secara tidak langsung terhadap perubahan sosial masyarakat dan produktivitas ekonomi. Dengan kata lain, pendidikan merupakan pondasi untuk sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu kepada pendidikan pengembangan sumber daya manusia bergantung.

Kebijakan pendidikan merupakan pendorong bagi lahirnya sistem pendidikan yang baik yang menyangkut konteks partisipasi pendidikan dan mempertimbangkan arah perbaikan mutu dan kualitas pendidikan. Kebijakan akan menentukan arah angin dunia pendidikan, seperti halnya berbagai contoh yang telah dilakukan oleh negara maju dan berkembang bagaimana kemudian kebijakan pendidikan di negara-negara tersebut menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan, karena meyakini bahwa kebijakan pendidikan akan memiliki *return of value* (nilai balik) yang strategis bagi perkembangan dan kemajuan sebuah negara.

Pendiri bangsa Indonesia sangat sadar arti penting pendidikan, sehingga urusan pendidikan menjadi amanat undang-undang negara ini. Siapapun pemimpin bangsa ini harus menjunjung tinggi amanat tersebut. Berkenaan dengan tugas menjalankan amanat itu pemimpin negara ini senantiasa mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai macam produk hukum sebagai payung dalam mengupayakan bangsa yang cerdas dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia dihadapkan dengan pilihan yang harus menjadi prioritas, yakni pemerataan pendidikan. Sedangkan pemerataan akan mengesampingkan mutu. Hal ini dikarenakan luas dan besarnya bangsa Indonesia. Bentuk upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan adalah dicanangkan wajib belajar. Wajib belajar diawali dari wajib belajar enam tahun dan sembilan tahun.

Bersamaan dengan bergulirnya wajib belajar, lahir dan tumbuh era otonomi daerah. Otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan skala prioritas dan potensi daerah. Kebijakan pendidikan di daerah dalam konteks otonomi daerah dikaitkan dengan kebijakan publik adalah UU 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, dan kebijakan pendidikan nasional.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 berkenaan dengan kebijakan pendidikan nasional, terdapat dua hal khusus *pertama*, menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD, *kedua*, pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga Negara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya sumber daya guna terselenggaranya pendidikan murah namun berkualitas bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun.

Keberhasilan pembangunan di daerah dalam konteks era otonomi saat ini sangat ditentukan oleh kemampuan aparat daerah dalam merumuskan program/kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan, yang harusnya didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.

Pemerintah merespon undang-undang tersebut dengan merumuskan kebijakan program pendidikan gratis. Kebijakan program pendidikan gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sering disebut Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun. Sumber pendanaannya berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah adalah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan konstitusi tentang hak seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Akan tetapi program ini belum sampai pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merespon kebijakan pendidikan nasional dengan menentukan kebijakan pemberian bantuan bagi penyelenggaraan pendidikan di semua level hingga pada level menengah atas sebagai salah satu program andalan yang diberi nama kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak

berupa keterangan-keterangan dan penjelasan yang bukan berbentuk angka. Menurut Rahardjo & Gudnanto dalam Arikunto (2011:250) adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh hasil evaluasi yang diinginkan.

Definisi Operasional Variabel

Evaluasi adalah merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan.

Evaluasi Model CIPP adalah salah satu model evaluasi yang sering digunakan untuk mengevaluasi program atau kebijakan dengan empat aspek yang di evaluasi yaitu konteks, input, proses, dan produk, Evaluasi konteks adalah evaluasi untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan? evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program atau kebijakan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi yaitu suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat Mardalis(2006:64). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti pendapat ini dikemukakan oleh Mardalis (2006:98). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan menyelidiki data-data tertulis yang ada dalam buku, majalah, dokumen,

surat-surat, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan analisis data ini diharapkan data yang diperoleh akurat dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi konteks

Hasil wawancara peneliti pada Key informan ditemui yakni Kepala Dinas Pendidikan memberikan tanggapan yang substantif pada evaluasi konteks. Evaluasi yang dijadikan acuan peneliti yaitu seputar Dasar Kebijakan, Maksud dan tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana proses penyusunan kebijakan ini. Sehubungan dengan pelaksanaan bantuan dana BPP, Kepala Dinas Pendidikan sebagai Key informan menyatakan bahwa dasar dilahirkan kebijakan ini sangat jelas yaitu kondisi demografi penduduk di Kabupaten Lampung Barat serta konsep strategis para pembuat kebijakan daerah yang memandang pendidikan sebagai aset strategis yang memiliki nilai return of value terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia.

Menurut informan evaluasi tujuan program yang benar-benar sangat diinginkan masyarakat adalah sebagai berikut. Masyarakat sangat menginginkan adanya program dana BPP ini diharapkan tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran, baik pada sisi kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Evaluasi Input

Hasil dari evaluasi input terhadap pelaksanaan Kebijakan ini adalah

langkah awal untuk mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program sangat bermanfaat terutama bagi pembuat keputusan karena dengan masukan hasil evaluasi program itulah para pembuat keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan (Arikunto dan Safrudin, 2004:72).

Adapun komponen-komponen evaluasi program, sebagai berikut: (1) Tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan diberitahukan kepada pelaksana program; (2) Kegiatan semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kegiatan harus relevan benar dengan tujuan; (3) Sarana fasilitas penunjang kegiatan; (4) Person pelaksana kegiatan; (5) Hasil keluaran sebagai akibat dari kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi input dalam kebijakan ini diperoleh beberapa temuan sebagai berikut. Pertama, Kesiapan anggaran daerah Kabupaten Lampung Barat telah dipastikan siap untuk dapat melanjutkan kebijakan ini ke depannya, strategi yang digunakan oleh pembuat kebijakan sebagian besar sudah sesuai dengan pencapaian tujuan yang dicanangkan sejak awal pelaksanaan kebijakan ini di tahun 2009. Adapun strategi utama dalam Kebijakan dana BPP ini yaitu memberikan bantuan kepada para siswa untuk mengikuti pendidikan. Akan tetapi, biaya-biaya pendidikan yang tanggung oleh pihak Pemerintah Daerah hanya berupa biaya operasional atau sebagai pengganti biaya komite sekolah. Sebagian besar sekolah menyatakan program dana BPP tidak menjadi penghalang dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan oleh pihak sekolah.

Tujuan tersebut misalnya melaksanakan proses pembelajaran

sesuai dengan jadwal dan juga pihak sekolah dapat melakukan kegiatan lain berupa kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, bantuan dana BPP sebagian besar informan menyatakan sudah sesuai dan mampu membiayai sebagian besar kebutuhan sekolah. Program yang disusun berdasarkan RAPBS sudah dilaksanakan oleh pihak sesuai dengan rencana anggaran tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kesiapan anggaran daerah dengan pelaksanaan kebijakan ini memiliki sebuah sinkronisasi pada pelaksanaannya.

Kesiapan SDM untuk melaksanakan dana BPP sudah cukup baik. Persiapan untuk melaksanakan program ini telah dilakukan oleh pihak sekolah sebelumnya. Hal ini menurut kepala sekolah, umumnya pengelolaan dana dan penyelenggaraan program terjadi biasa saja, yang sebelumnya tenaga yang terlibat sudah terlatih dan sesuai dengan pemahaman di bidangnya masing-masing. Di antara strategi yang dijalankan sekolah untuk menyukseskan kebijakan ini, peneliti menanyakan kembali hal ini kepada para informan. Dari jawaban informan tersebut diperoleh jawaban yang sangat beragam, namun peneliti dapat menyimpulkan bahwa umumnya pencapaian strategi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah sebelum adanya kebijakan ini sudah dicapai dan cocok untuk dikembangkan. Sebagian besar informan menyatakan strategi yang telah dicapai tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Hal ini sudah dilakukan dan dicapai oleh pihak sekolah sesuai dengan target yang dicapai. Untuk melaksanakan strategi yang disusun tersebut pihak sekolah tentu harus menyusun prosedur dan jadwal pelaksanaan.

Hasil penelitian diketahui bahwa prosedur dan jadwal khusus yang digunakan untuk melaksanakan strategi

di antaranya adalah melaksanakan bimbingan Imtaq dan Imtek, mengefektifkan jadwal pembelajaran, memberikan pelajaran tambahan. Berdasarkan hasil evaluasi program di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa pihak sekolah telah menyusun program perencanaan dalam bentuk RAPBS. Penyusunan program tersebut kurang melibatkan guru-guru di lapangan. Pihak sekolah telah menganalisis skala prioritas program yang harus didahulukan begitu pula dengan prioritas sumber dayanya. Jika dikaitkan dengan dana BPP yang diterima sekolah ada beberapa pos program yang tidak dibiayai oleh dana BPP

Dalam konteks respon dan partisipasi masyarakat hasil wawancara menunjukkan respon dan partisipasi yang positif, semua elemen masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa dana BPP memberikan bantuan berarti bagi pendanaan pendidikan bagi anak-anak mereka, meski dalam beberapa perspektif ada juga yang menyatakan bahwa mindset para orang tua juga sudah baik artinya tidak perlu tergantung dengan adanya bantuan atau tidak mereka tetap termotivasi menyekolahkan anaknya hingga minimal jenjang SMA dan SMK

Evaluasi Proses

Dari hasil penelitian terdapat beberapa temuan bahwa evaluasi proses penyelenggaraan bantuan dana BPP diketahui bermacam-macam. Dari beberapa temuan peneliti tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan program yang telah disusun oleh pihak sekolah. Pelaksana program pada tingkat sekolah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan jobnya masing-masing. Hal ini diperkuat oleh data observasi peneliti bahwa pihak pemerintah daerah mensosialisasikan

dengan baik terkait dengan alur penyaluran dan pencairan dana

Sekolah menertibkan surat keputusan manajemen sekolah sebagai pengelola BPP, dan ditembuskan kepada pihak Dinas Pendidikan. Ketetapan penggunaan fasilitas dan bahan penunjang lain telah digunakan secara tepat oleh pihak sekolah. Hanya saja ada sedikit hambatan dalam pelaksanaan program yaitu pencairan dana BPP yang sering terlambat. Hal ini tentu saja sangat mengganggu aktivitas sekolah, terutama di dalam membayar gaji atau honor guru/pegawai, akan tetapi dapat teratasi dengan manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh sekolah yakni pinjam meminjam dana dengan pendampingan dana dari BOS pusat.

Dalam hal penyaluran, pemerintah telah mensosialisasikan dengan baik hal ini sehingga difahami alur ini secara sama oleh semua pihak, pencairan langsung melalui PT. Bank Lampung juga dapat meminimalisir kecurangan dalam pencairan dana oleh pihak sekolah.

Evaluasi Produk

Evaluasi produk/hasil merupakan bagian akhir dari evaluasi pencapaian program dari sebuah kebijakan. Hasil penelitian diperoleh beberapa temuan bahwa sebagian besar tujuan sudah tercapai dengan cukup baik. Dengan adanya bantuan dana BPP dapat membantu pihak sekolah dan orang tua dalam pembiayaan operasional sekolah. Hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa produk kebijakan dana BPP telah menghasilkan hasil yang cukup memuaskan. Program tersebut belum dapat menampung kebutuhan-kebutuhan sekolah, terutama kebutuhan akan fasilitas belajar. Produk dana BPP sebagian besar hanya bisa membiayai gaji guru honor dan pembiayaan pembelajaran sehari-hari yang bersifat wajib

Temuan selanjutnya diketahui realisasi antara spesifikasi prosedur dengan hasil nyata dari kegiatan program tampak belum menyentuh hasil yang memuaskan. Pihak sekolah beranggapan bahwa bantuan dana BPP telah mencukupi kebutuhan satu tahun biaya personalia sekolah. Sedangkan pada saat penelitian ini dilakukan peneliti mengevaluasi penggunaan dana dengan program pelaksanaan selama satu semester (dua kali triwulan). Itulah sebabnya, pihak sekolah belum bisa memberikan gambaran mengenai hasil nyata dari pencapaian dana BPP ini. Hanya saja pihak mengharapkan bantuan dana BPP hendaknya berlangsung secara kontinyu dan tepat waktu.

Efektivitas proses penyaluran dan penerimaan bantuan BPP telah dievaluasi di atas berdasarkan sub fokus penelitian yaitu menggunakan model CIPP yang dalam penilaiannya berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2014 dan No.09 Tahun 2014. Dalam hal penggunaan dana umumnya informan menyatakan telah berlangsung dengan baik, senada dengan yang disampaikan oleh pihak dinas pendidikan bahwa monitoring langsung jarang dilakukan karena sekolah telah berpartisipasi aktif dengan absah melaporkan penggunaan dana per termunya, dan juga kecil kemungkinan terjadi peyelewanan dana karena pos anggaran yang telah jelas namun bersifat fleksibel dalam jumlahnya.

Pendapat ini memperlihatkan bahwa manfaat yang baik dari program dana BPP ini, dana yang digunakan cukup membantu operasional, dan pelaksanaan pembelajaran sehingga sekolah dalam memberikan laporan

pertanggungjawaban bersifat proaktif kepada pihak dinas pendidikan.

Pada prinsipnya, dinamika kegiatan tercermin dalam aspek manajemen pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan manajemen sekolah. Pihak manajemen kota ketika mengelola dan menyalurkan dana bantuan BPP harus melakukan tahap penyeleksian, terutama sekali menyeleksi kebenaran data jumlah siswa yang diusulkan dan selanjutnya melakukan *cross check* tentang kebenaran data yang diusulkan. Berkenaan dengan dinamika ketepatan jumlah dana yang disalurkan ke sekolah-sekolah. Pihak manajemen pemerintah daerah yang di dalam hal ini diwakili oleh tim dari dinas pendidikan setempat pada umumnya dinilai relatif baik.

Faktor yang menjadi penyebab keterlambatan tersebut tidak lain karena pemeriksaan data, yang harus dilakukan secara akurat. Selanjutnya, dari sisi dinamika keragaan ketepatan sebaran dana, umumnya ditemukan relatif baik, meski tidak sebaik dalam hal ketepatan waktu dan jumlah yang diberikan kepada pihak sekolah. Ketepatan sebaran dana pada BPP ditemukan relatif lebih baik dan cukup membantu pembiayaan kebutuhan sekolah. Dari sisi kesesuaian mekanisme penggunaan dana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, ditemukan masih menemukan kendala, sebagian sekolah masih diperlukan penyempurnaan sebab terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme penyalurannya.

Pembahasan ini diseparasikan berdasarkan fakta bahwa program penggunaan dana tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah lain (lihat lampiran penggunaan dana BPP). Perbedaan besarnya jumlah anggaran masing-masing sekolah ini tergantung dari kebutuhan-kebutuhan masing-masing sekolah. Bagi sekolah yang

belum mempunyai fasilitas dan sarana belajar yang serba kurang tentu akan menambahkan anggarannya untuk menutupi hal ini. Berbeda dengan sekolah yang sudah sedikit maju dengan fasilitas dan sarana belajar yang cukup baik, tentu penambahan dana akan dialihkan ke pos pengeluaran yang lain. Meskipun ada berbagai kelemahan program bantuan dana BPP ini, namun pada umumnya solusinya bukan menghentikan program tersebut yang ada atau menciptakan program-program baru tapi menentukan dan melaksanakan perbaikan besar pada program bantuan dana BPP yang ada sekarang, yaitu meningkatkan secara signifikan manfaat bagi orang tua melalui perhatian pada hal-hal berikut dalam program-program yang disempurnakan. Implementasi dana BPP di SMK N 1 Liwa dan SMK 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat terbukti dapat meringankan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua. Selain itu, bantuan dana BPP setidak-tidaknya akan mampu meningkatkan APK atau APM pendidikan khususnya di Kabupaten Lampung Barat

Dalam Konteks motivasi guru jawaban para informan memberikan gambaran yang cukup bervariasi di dua sekolah, artinya ada sekolah yang memang sebelum adanya kebijakan ini gaji gurunya memang tidak naik dan tidak turun, sedangkan ada juga di sekolah yang diteliti lainnya mengalami penurunan gaji karena proses penyeragaman gaji perjam guru honor, sehingga dalam konteks motivasi guru pada dasarnya guru memang megatakan tidak memiliki pengaruh secara langsung.

KESIMPULAN

Pada evaluasi konteks, yaitu: (1) dasar dilahirkannya kebijakan tersebut memiliki latar belakang yang jelas dan

sudah terpenuhi dalam data dan regulasi yang digunakan sebagai dasar kebijakan dana BPP; (2) tujuan dan maksud dari kebijakan telah menjadi prioritas pencapaian yang utama dan tertuang jelas dalam regulasi; (3) Proses penyusunan kebijakan ini telah melalui alur yang melibatkan berbagai stakeholder terkait mulai dari pemangku kepentingan teratas pada level kabupaten sampai pada pihak sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah juga telah dilibatkan sejak awal, sehingga secara bersama-sama oleh semua pihak apa yang menjadi dasar, maksud dan tujuan serta mengapa dilahirkan kebijakan ini secara jelas dan transparan telah dikethui sampai pada level pelaksana kebijakan, meskipun dalam hal ini guru belum memiliki pengetahuan yang lebih mengenai kebijakan ini

Pada evaluasi input, yaitu: (1) strategi yang diterapkan sejak awal terkait dengan analisis kesiapan anggaran dan alur penetapan anggaran daerah dalam hal ini APBD yang menjadi sumber dana dalam kebijakan ini telah melalui proses yang sistematis, dan secara jangka panjang telah terbukti bahwa Kabupaten Lampung Barat siap untuk terus melanjutkan kebijakan ini, diperkuat dengan fakta bahwa selama pelaksanaan kebijakan ini sejak tahun 2009 hingga saat ini belum terjadi defisit anggaran yang jika itu terjadi dapat menyebabkan dihentikannya dana bantuan ini; (2) Dalam kesiapan SDM disekolah juga telah disiapkan dengan baik tidak ada penolakan dalam pelaksanaan kebijakan ini, dan tim pengelola disekolah telah memahami dengan baik tentang seperti

apa kebijakan ini akan dijalankan serta telah disosialisasikan dengan baik oleh pihak kepada masyarakat yang akan menjadi partisipan dan objek dalam kebijakan ini; (6) Sehingga dengan hal tersebut Respon dan partisipasi masyarakat dinilai cukup positif dalam menyambut berjalannya kebijakan ini

Pada evaluasi proses, yaitu: (1) Terdapat pemahaman yang sama dan tidak menimbulkan ambiguitas tentang alur penyaluran dan pencairan dana mulai sejak pengajuan data oleh pihak sekolah sampai pada pencairan, pemerintah juga membuat alur yang tidak rumit dalam hal ini namun tetap melibatkan semua unsur penting yang berkaitan dengan proses pencairan dana; (2) Pelaksanaan di sekolah dapat berjalan dengan baik, tidak ada penolakan atau protes dari guru maupun personil sekolah lainnya mengenai pelaksanaan kebijakan ini disekolah, namun sekolah kurang memberikan sosialisasi yang transparan kepada para siswa tentang besaran dana yang diterima oleh masing-masing siswa, selain itu dalam penggunaan pos anggaran dinas pendidikan telah memberikan batasan yang jelas bagi semua sekolah tentang jumlah-jumlah dana dalam setiap pos, dan ini berbeda di masing-masing sekolah, ini menunjukkan suatu pemahaman yang baik dari dinas pendidikan tentang kondisi di masing-masing sekolah, selain itu di dua sekolah yang dijadikan situs penelitian sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan sangat baik meskipun sekolah tersebut tidak lagi menerapkan iuran komite sekolah, ini menunjukkan bahwa dalam konteks ketercukupan

dana dapat dengan baik diefektifkan oleh pihak sekolah; (3) berkaitan dengan kendala pelaksanaan belum ditemui kendala yang berarti selama proses pelaksanaan kebijakan ini, hanya saja pada saat menunggu pencairan pada termin berikutnya sekolah harus mencari strategi untuk menutupi kebutuhan yang ada di sekolah.

Pada evaluasi hasil (*Product*), yaitu: (1) Tujuan sudah dicapai oleh pihak pemerintah daerah ;(2) kebutuhan individu belum semua terpenuhi pihak sekolah; (3) Kebijakan ini sedikit banyak memberi pengaruh terhadap motivasi guru, terutama bagi guru honor (guru tidak tetap) berkaitan dengan adanya penyeragaman honor per jam di seluruh sekolah menggunakan indeks dana ini, sehingga ada sekolah yang pembayaran bagi guru tidak tetapnya justru menurun setelah adanya kebijakan ini. Namun menyoal motivasi mengajar lebih jauh guru tidak terpengaruh secara langsung dengan adanya kebijakan ini; (4) Dalam hal motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan, kebijakan ini memberi pengaruh yang cukup positif cukup baik dengan diterapkannya kebijakan ini karena mereka/orang tua mereka merasa terbantu dengan tidak lagi adanya pungutan biaya Komite; (5) Yang terakhir kebijakan ini juga telah dipandang memiliki hasil jangka panjang setidaknya-tidaknya mampu meningkatkan APK pada semua jenjang pendidikan.

IMPLIKASI

Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi atas hasil / temuan dari suatu penelitian. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini

dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk meneruskan kebijakan dana BPP dengan perbaikan pada beberapa aspek yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya . Dengan dana BPP sebagai *guidelines* pendidikan membawa implikasi terhadap capaian tujuan peningkatan partisipasi masyarakat pada satuan pendidikan SMA/K di Kabupaten Lampung Barat. Dampak nyata nya adalah bertambahnya data APK di Kabupaten Lampung Barat, hal ini merupakan implikasi inovasi pemerintah Kabupaten Lampung Barat berhasil dalam memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin sekaligus memberikan kesempatan masyarakat untuk mengenyam di sekolah yang lebih bermutu. Melihat hasil penelitian atas kebijakan dana BPP, sudah selayaknya kebijakan serupa bisa diselenggarakan di daerah-daerah lainnya dengan memperkuat aspek-aspek yang menjadi temuan penelitian dana BPP di Kabupaten Lampung Barat.

Implikasi Teoritis

Dengan penggunaan model CIPP, didapatkan hasil informasi yang merupakan *feedback* terhadap pelaksanaan kebijakan dana BPP. Hal ini memberikan implikasi terhadap keharusan perbaikan terhadap beberapa aspek, seperti pada kajian teoritis sebelumnya menyebutkan bahwa pentingnya kesamaan persepsi mendorong suksesnya suatu program (Stufflebeam dalam Arikunto;2012). Temuan di lapangan berdasarkan kajian teori penghambat implementasi memberikan gambaran bahwa kebijakan dana BPP masih ditemukan beberapa

faktor yang bisa menghambat suksesnya tercapainya tujuan dari kebijakan ini

Implikasi Metodologis

Dari kajian analisis lapangan menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada model CIPP, berhasil didapatkan informasi yang berguna bagi kebijakan ini. Informasi dengan metode kualitatif yang penting dalam kerangka perbaikan kebijakan ini. Dari hasil penelitian, implikasi pada kebijakan dana BPP dinilai baik untuk dilanjutkan kembali tetapi masih diperlukan perbaikan di beberapa aspek, seperti kelengkapan peraturan dan aturan penjabar dari peraturan tersebut. Kemudian, CIPP terbukti mampu menghasilkan informasi yang baik seperti teori yang dibangun dari model ini yaitu menghasilkan informasi yang komprehensif terhadap suatu kebijakan/program. Dari penelitian ini terdapat pelajaran penting yang bisa digunakan oleh para pemangku kebijakan dalam memberikan pertimbangan dalam keberlanjutan kebijakan dana BPP. Berikut disampaikan *Lesson Learned* dan catatan hasil penelitian :

1. Peraturan yang menjadi dasar dari kebijakan ini dinilai masih ditemui kelemahan. Hal ini perlu perbaikan dari pemangku kebijakan dalam merumuskan kembali kebijakan tersebut.
2. Kebijakan dana BPP mempunyai tujuan mulia, hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya pemangku kebijakan. Dukungan tersebut baik bersifat politis maupun komitmen dalam kerangka memperkuat landasan kebijakan dana BPP.

3. Sudah saatnya kebijakan subsidi semacam ini dibarengi dengan strategi peningkatan mutu karena tantangan pendidikan saat ini di daerah, tidak hanya dalam hal bagaimana meningkatkan partisipasi namun juga memberi efek mutu yang berkualitas dari output pendidikan yang dihasilkan.

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan dana BPP mendapat dukungan yang sangat positif dari masyarakat, namun disisi lain pelaksanaannya di sekolah dalam kebijakan ini dinilai masih belum mewujudkan azas dari peraturan yang mendasarinya yaitu tidak diskriminatif.

SARAN

Bagi Pihak Pemerintah Daerah

1. Kebijakan ini baik untuk terus dilanjutkan, sesuai dengan harapan yang tertampung dari pendapat semua pihak, hanya saja dalam hal pengindeksan jumlah dana persiswa hendaknya menyesuaikan secara real kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan, karena indeks ini sangat mempengaruhi efektifitas dan ketercukupan dana yang diberikan kepada pihak sekolah, mengingat sudah tidak lagi dibolehkan memungut biaya kepada masyarakat/orang tua siswa.
2. Dengan adanya wacana pemindahan pengelolaan pendidikan menengah atas kepada pihak dinas provinsi, maka hendaknya jika di tingkat SMA/SMK akan dihentikan pada tahun depan, hendaknya benar-benar disosialisasikan dengan baik kepada pihak terkait dengan kebijakan ini, agar tidak terjadi

kerancuan dan kebingungan dalam masyarakat

3. Sudah saatnya pihak dinas juga memiliki strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah untuk mendampingi kebijakan pendanaan ini
4. Agar benar-benar melakukan monitoring langsung dengan turun langsung dan melihat kondisi pelaksanaan di sekolah secara rutin tidak hanya berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban diatas kertas, karena sesungguhnya pembinaan bersifat tatap muka secara langsung dapat memberikan efek yang baik bagi kebijakan ini

Bagi Pihak Sekolah

1. Agar siswa di sosialisasikan dengan baik juga tentang kebijakan ini karena siswa pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ini, setidaknya mereka mengetahui besaran dana yang mereka terima dari pemerintah melalui pihak sekolah
2. Agar sekolah juga melaksanakan kebijakan ini dengan terus mengacu pada pelayanan pendidikan yang berorientasi kepada mutu, artinya sekolah perlu melakukan terobosan-terobosan tentang bagaimana mengelola dana yang ada menuju layanan pendidikan yang semakin berorientasi kepada mutu

Bagi Masyarakat / Orang Tua

1. Agar terus termotivasi menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi, karena dalam semua level pendidikan pemerintah pusat ataupun daerah telah menunjukkan keberpihakan yang baik dalam

konteks pendanaan pendidikan bersubsidi bagi masyarakat

2. Untuk terus ikut mengawal proses pelaksanaan kebijakan, tidak hanya menjadi objek dalam pelaksanaan, namun masyarakat juga bagian yang berhak mengevaluasi setiap kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Alifuddin, M. 2011. *Kebijakan Pendidikan Non Formal : Teori, Aplikasi dan Implikasi*. Jakarta: Magna Ascript Publishing.
- Arikunto, S. Dan Yuliana. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Emzir, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press..
- Hussaini, U. 2009. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Senduk, J.F. 2010. *Pola Pembuatan Kebijakan Pendidikan*. (Tesis). Sulawesi Utara. Universitas Negeri Manado.
- Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah. 2009. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori, dan Aplikasi Dalam Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Suryono, Yoyon. 2000. *Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta. FIP UNY
- Syafarudin. 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Pt.Absurd Garfindo Bandung Perkasa.
- Yoyon, B.I. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa